

**ANALISIS EFEKTIVITAS ATAS KETETAPAN HASIL PEMERIKSAAN
PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

Novia Indri Pratiwi

01031381720081

Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS EFEKTIVITAS ATAS KETETAPAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Disusun oleh :

Nama : Novia Indri Pratiwi
NIM : 01031381720081
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 22 Juli 2019

Ketua,



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E.,M.B.A.,Ak

NIP : 197405111999032001

Tanggal : 05 Juli 2019

Anggota,



Meita Rahmawati, S.E.,M.Acc.,Ak

NIP : 198605132015042002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS ATAS KETETAPAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Disusun Oleh:

Nama : Novia Indri Pratiwi
NIM : 01031381720081
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 01 Agustus 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

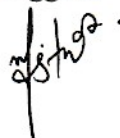
Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 01 Agustus 2019

Ketua



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak
NIP. 197405111999032001

Anggota



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 198605132015042002

Anggota



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Indri Pratiwi
NIM : 01031381720081
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul:
Analisis Efektivitas Atas Ketetapan Hasil Pemeriksaan Pajak dan Kontribusinya
Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

Pembimbing

Ketua : Dr. Luk Luk Fuadah, S.E.,M.B.A.,Ak
Anggota : Meita Rahmawati, S.E.,M.Acc.,Ak
Tanggal Ujian : 01 Agustus 2019

Adalah benar karya saya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjana.

Palembang, 01 Agustus 2019

Pembuat Pernyataan


Novia Indri Pratiwi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Niat, berusaha, berdoa, bersabar, bersyukur dan rendah hati ☺

**Aku ingin membahagiakan dan membuat kedua orang tua ku
selalu tersenyum dan aku selalu membutuhkan doa dari mereka,
sebelum mereka menutup mata ataupun aku yang terlebih dahulu
Aamiin☺**

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Allah
- ❖ Kedua Orang tua ku
- ❖ Saudara - Saudariku
- ❖ Sahabat dan Temanku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Efektivitas Atas Ketetapan Hasil Pemeriksaan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang” yang merupakan bagian dari mata kuliah Perpajakan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik bagi penulis. Penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dapat dikatakan sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan terhadap kekurangan tersebut demi meningkatkan skripsi ini menjadi bermanfaat. Atas kekurangan dan kekhilafan penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Efektivitas Atas Ketetapan Hasil Pemeriksaan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, Aamiin.

Penulisan skripsi ini juga tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dan Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagiku.
2. Kedua orang tuaku serta saudara/i ku tercinta, yang telah memberikan Do,a dan dukungan moral selama hidupku
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Emylia Yuniartie, SE., M.Si., Ak selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan di Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E.,M.B.A.,Ak dan Ibu Meita Rahmawati, S.E.,M.Acc.,Ak selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing serta memberikan banyak saran, dan dukugan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen dan Karyawan-karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kesan dan pengalaman terbaik semasa kuliah.
9. Segenap pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yang telah bersedia menerima penulis untuk menjadi tempat penelitian.
10. Bapak Afli Yuma Delon dan Bapak Taufan Kurniawan yang telah bersedia sebagai narasumber saya untuk menggali informasi lanjut tentang penelitian skripsi saya.
11. Teman-temanku seperjuanganku yang sama-sama bersemangat untuk saling memberikan memotivasi agar tidak mudah untuk putus asa.

Akhir kata penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT dapat membalaskan budi baiknya, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, Juli 2018

Novia Indri Pratiwi

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS ATAS KETETAPAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Oleh:
Novia Indri Pratiwi

Konsep efektivitas yang dikaitkan dengan pemeriksaan adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Madya Palembang di setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP Madya Palembang. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif yang fokus pada efektivitas dengan menggunakan indikator Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan dan jumlah Surat Ketetapan Pajak. Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2015 dan 2016 masuk dalam kategori sangat efektif dengan presentase lebih dari >100%, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan sehingga masuk dalam kriteria efektif dengan presentase 96% dan 93%. Berdasarkan dari segi penyelesaian SKP, tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tidak efektif dengan presentase <60%. Adapun juga hasil penelitian kontribusi berdasarkan hasil penerimaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya Palembang juga masuk dalam kategori sangat kurang dengan persentase dibawah 10%. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak antara lain sikap Wajib Pajak, petugas pemeriksa pajak, waktu pemeriksaan yang singkat, psikologi Wajib Pajak, fasilitas kantor, komunikasi, serta dukungan dari pimpinan dan kerjasama yang baik antar bagian.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Faktor-Faktor Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

Ketua,



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak
NIP : 197405111999032001

Anggota,



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak
NIP : 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP : 197303171997031002

ABSTRACT

EFFECTIVENESS ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF TAX EXAMINATION AND ITS CONTRIBUTION TO TAX RECEIPT ON THE TAX OFFICE MADYA PALEMBANG

By:
Novia Indri Pratiwi

The concept of effectiveness associated with the examination is how much realization can be achieved on the targets set by the Tax Office Madya Palembang each year to meet the stated objectives. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of tax audits in an effort to increase tax revenues at the Tax Office Madya Palembang. The research method used is descriptive research that focuses on effectiveness by using indicators of the number of audit warrant and the number of tax assessment letters. The results of the effectiveness study in terms of the completion of SP2 in 2015 and 2016 fall into the very effective category with a percentage of more than > 100%, whereas in 2017 and 2018 it decreased so that it was included in the effective criteria with a percentage of 96% and 93%. Based on SKP resolution, 2015 to 2018 is not effective with a percentage of <60%. As for the results of research contributions based on the results of receipt of tax audits of tax revenues at the Tax Office Madya Palembang also fall into the very less category with a percentage below 10%. Factors that influence the effectiveness of tax audits include the attitude of taxpayers, tax audit officers, short inspection times, psychology of taxpayers, office facilities, communication, and support from leaders and good cooperation between parts.

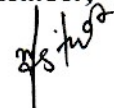
Keywords : Effectiveness, Contribution, Tax Audit, Tax Revenue, Factors for Implementing Tax Examinations.

Chairman,



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak
NIP : 197405111999032001

Member,



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak
NIP : 198605132015042002

Acknowledged by,
Head of Accounting Department



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP : 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN

Kami Dosen Pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Novia Indri Pratiwi
NIM : 01031381720081
Jurusan : Akuntansi
Judul : Analisis Efektivitas atas Ketetapan Hasil Pemeriksaan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Ketua,



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak
NIP.197405111999032001

Anggota,



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa/i : Novia Indri Pratiwi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 18 November 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. Akmal No.787 RT.015 RW.004
Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur
Alamat Email : noviaindripratiwi18@gmail.com

Pendidikan Formal

Tahun Ajaran 2002-2008 : SD Xaverius 1 Baturaja
Tahun Ajaran 2008-2011 : SMP Negeri 1 OKU Baturaja
Tahun Ajaran 2011-2014 : SMA Negeri 1 OKU Baturaja
Tahun Ajaran 2014-2017 : Universitas Sriwijaya (D3)
Tahun Ajaran 2017-2019 : Universitas Sriwijaya (S1 Asal D3)

Pendidikan Non Formal

Pelatihan e-SPT IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)
Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)
Kursus Pelatihan Microsoft Word (Media Sarana Informasi Baturaja)
Kursus Pelatihan Microsoft Excel (Media Sarana Informasi Baturaja)
Praktik Kerja Lapangan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Organisasi

MPK SMAN 1 OKU (Bendahara I)
AIESEC in UNSRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI.....	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR PERSAMAAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Teori Atribusi (<i>Atribution Theory</i>).....	11
2.1.2. Efektivitas.....	12
2.2. Perpajakan.....	13
2.2.1. Pengertian Pajak	13
2.2.2. Sistem Pemungutan Pajak	14
2.2.3. Pemeriksaan Pajak.....	14
2.2.4. Tujuan Pemeriksaan Pajak	16
2.2.5. Ruang Lingkup Pemeriksaan.....	18

2.2.6. Surat Perintah Pemeriksaan	19
2.2.7. Surat Ketetapan Pajak.....	20
2.2.8. Penerimaan Pajak	20
2.3. Penelitian Terdahulu	22
2.4. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Desain Penelitian	30
3.2. Lokasi Penelitian.....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	35
4.1. Pembahasan.....	35
4.1.1. Gambaran Umum KPP Madya Palembang	35
4.1.1.1. Sejarah Pembentukan KPP Madya Palembang	35
4.1.2. Lokasi	36
4.1.3. Visi, Misi, dan Nilai	37
4.1.4. Struktur Organisasi	38
4.1.5. Tugas Pokok Sub Bagian dan Seksi	40
4.1.6. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)	42
4.1.7. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang ..	43
4.1.8. Wajib Pajak KPP Madya Palembang	44
4.2. Analisis dan Hasil Penelitian	44
4.2.1. Target dan Realisasi Jumlah Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan KPP Madya Palembang	44
4.2.2. Target dan Realisasi Jumlah Surat Ketetapan Pajak KPP Madya Palembang	47
4.2.3. Kontribusi Ketetapan Hasil Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang	49
4.2.3.1.Perkembangan Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Palembang	49
4.3.2.2. Kontribusi atas Ketetapan Hasil Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang	50

4.2.4. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang	52
4.2.5. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	63
5.3. Keterbatasan.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan APBN yang bersumber dari Penerimaan Pajak Tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah)	3
Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan APBN yang bersumber dari Penerimaan Bukan Pajak Tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah)	3
Tabel 1.3. Target dan Realisasi Penerimaan APBN yang bersumber dari Hibah Tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah)	3
Tabel 1.4. Daftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang Mengalami Pertumbuhan Pajak Positif Tahun 2016.....	7
Tabel 1.5. Daftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang Mengalami Pertumbuhan Pajak Negatif Tahun 2016	7
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1. Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	33
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	34
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penyelesaian SP2 KPP Madya Palembang tahun 2015-2018 (dalam bentuk jumlah surat).....	45
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) KPP Madya Palembang Tahun 2015-2018 (dalam bentuk rupiah)	47
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang Tahun 2015-2018 (dalam bentuk rupiah)	49
Tabel 4.4 Perhitungan Kontribusi atas Ketetapan Hasil Pemeriksaan Pajak (SKP) Terhadap Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang Tahun 2015-2018 (dalam bentuk rupiah).....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Madya Palembang	39

DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan 1. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)	33
Persamaan 2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)	33
Persamaan 3. Penerimaan Hasil Pemeriksaan Pajak Berdasarkan SKP dan Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang	34

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. SK Pembimbing (Tanggal 12 Desember 2018 – 12 Maret 2019)**
- 2. SK Pembimbing (Tanggal 23 Mei 2019 – Tanggal 23 November 2019)**
- 3. SK Penguji Ujian Komprehensif**
- 4. Surat Izin Riset (KPP Madya Palembang)**
- 5. Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian
(KPP Madya Palembang)**
- 6. Surat Pernyataan Izin Riset**
- 7. Surat Izin Mohon Penelitian (Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi)**
- 8. Data Riset SP2, SKP, Penerimaan Pajak Tahun 2015 – 2018
KPP Madya Palembang**
- 9. Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015**
- 10. Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016**
- 11. Realisasi APBN Tahun Anggaran 2017**
- 12. Realisasi APBN Tahun Anggaran 2018**
- 13. Daftar Wawancara**
- 14. Foto Bersama Narasumber**
- 15. Foto Bersama Pembimbing dan Penguji Pada Saat Ujian Komprehensif**
- 16. Agenda Konsultasi Proposal**
- 17. Agenda Konsultasi Skripsi**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara besar yang mempunyai wilayah luas dan masyarakat beragam yang disatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara melalui pemerintah berupaya melakukan pembangunan-pembangunan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial untuk mencapai tujuan negara tersebut. Pemerintah sejak kemerdekaan Republik Indonesia menggalakkan pembangunan-pembangunan tersebut yang diistilahkan dengan pembangunan nasional (Ginting, 2017).

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Pembangunan nasional memerlukan dana yang besar dan rencana yang mantap, tanpa didukung dengan dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri

ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita melalui pembangunan tersebut akan tercapai. Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang memerlukan kontribusi sumbangan rakyat Indonesia dalam menggerakkan roda pemerintahan guna untuk mencapai produktifitas kerja yang baik (Djohan, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah. Tiga sumber ini yang jadi lumbung penerimaan kas negara, besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu komponen penting di dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal tersebut dapat dikatakan karena APBN merupakan mesin penggerak penyelenggaraan pemerintahan negara (www.onlinepajak.com). Sumber pendapatan negara akan kembali lagi pada rakyat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum, dan sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak.

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara, oleh sebab itu penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Kontribusi penerimaan dari sektor perpajakan

merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, terbukti terlihat dari data Realisasi APBN dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Realisasi dan target penerimaan APBN yang berasal dari tiga sumber (penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah) pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan APBN yang bersumber dari Penerimaan Pajak Tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	1.489,3	1.240,4	83,3%
2016	1.539,2	1.285,0	83,5%
2017	1.472,7	1.343,5	91,2%
2018	1.618,1	1.301,5	80,4%

Sumber : Kemenkeu.go.id

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan APBN yang bersumber dari Penerimaan Bukan Pajak Tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	269,1	253,7	94,3%
2016	245,1	261,9	106,9%
2017	260,2	311,2	119,6%
2018	275,4	350,8	127,4%

Sumber : Kemenkeu.go.id

Tabel 1.3. Target dan Realisasi Penerimaan APBN yang bersumber dari Hibah Tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	3,3	10,4	314,9%
2016	2,0	8,2	417%
2017	3,1	11,6	374,2%
2018	1,2	10,6	885,7%

Sumber : Kemenkeu.go.id

Kontribusi pajak dalam Realisasi APBN dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus meningkat. Tahun 2015 kontribusi pajak mencapai 83,3%, tahun 2016 kontribusi pajak mengalami kenaikan 0,2% dari tahun sebelumnya menjadi 83,5%. Kenaikan kontribusi pajak makin bertambah 7,7% di tahun 2017 sehingga

persentase kontribusi pajak menjadi 91,2%. Penurunan realisasi pajak terhadap APBN pada tahun 2018 terjadi menjadi 80,4% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan selisih 10,8%. Penerimaan APBN bukan hanya dilihat dari penerimaan pajak saja, penerimaan bukan pajak juga ikut andil dalam memberikan kontribusi penerimaan negara seperti sumber daya alam, bagian laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya. Persentase realisasi penerimaan yang bersumber dari bukan pajak juga mengalami kenaikan bahkan melebihi 100%, pada tahun 2015 dengan persentase penerimaan bukan pajak sebesar 94,3%, selanjutnya persentase peningkatan terus naik pada tahun 2016 sebesar 106,9%, dan di tahun 2017 persentase realisasi penerimaan bukan pajak mencapai 119,6%. Kenaikan realisasi penerimaan bukan pajak terjadi pada tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 127,4%. Selain itu, ada juga hibah yang ikut berperan dalam penerimaan APBN negara. Persentase realisasi penerimaan hibah dari tahun ke tahun memang tidak selalu meningkat melainkan mengalami penurunan. Tahun 2015 persentase realisasi penerimaan hibah sebesar 314,9%, di tahun berikutnya realisasi penerimaan hibah meningkat mencapai 417%, akan tetapi penurunan realisasi penerimaan hibah terjadi pada tahun 2017 yang menyebabkan persentase hibah menjadi 374,2%. Penerimaan hibah pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 885,7%. Berdasarkan data tersebut, walaupun angka persentase realisasi penerimaan bukan pajak dan hibah mencapai lebih dari 100%, realisasi penerimaan pajak tetap menjadi peran penting dalam penerimaan APBN karena dilihat dari nilai target dan realisasi penerimaan pajak memiliki nilai (*value*) lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak dan hibah.

Pajak sangat penting untuk keberhasilan suatu negara, dengan begitu keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada awal tahun 1984 sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Sistem perpajakan *official assessment system* merupakan tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada pemerintah (fiskus), sedangkan dalam *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu mekanisme untuk mendukung dan melakukan pengawasan terhadap *self assessment system* yaitu dilakukan penegakan hukum perpajakan. Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak sebagai bentuk penegakan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Shabirin, 2011).

Sebagai salah satu bentuk penegakan hukum terkadang proses pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif seperti yang diharapkan, hal ini terjadi karena adanya manipulasi pemeriksaan pajak serta peran aparat pajak yang tidak profesional, kurang kemampuan dan integritas. Selain itu dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat bukti yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak, pelanggaran tersebut adalah adanya dugaan penyelewengan dalam restitusi pajak (Sasmito, 2011) yang dikutip oleh (Ariyanti, 2016). Kurang berkualitasnya pemeriksaan pajak berdasarkan survei pendahuluan menurut salah satu pegawai fungsional pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees disebabkan karena kurang rutinnya kegiatan pelatihan dan hanya diadakan berdasarkan golongan saja tidak menyeluruh, dan masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh bahkan melakukan pelanggaran dengan segala cara melakukan manipulasi agar beban pajak berkurang dan berusaha menyuap pemeriksa pajak membuat resiko penyelewengan pajak semakin besar (Akbar, 2016) yang dikutip oleh (Ariyanti, 2016). Berdasarkan hal tersebut maka standar pemeriksaan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 mengenai pendidikan dan pelatihan pemeriksa pajak harus dilaksanakan cukup, serta pentingnya peningkatan kompetensi dalam pemeriksaan pajak dan standar khusus terkait perpajakan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Kakanwil DJP Sumsel Babel), M. Ismiransyah M. Zain menyatakan penerimaan pajak tahun 2016 di Sumsel dan Babel, KPP Pratama Prabumulih tercatat memperoleh capaian tertinggi penerimaan pajak tahun 2016

yaitu sebesar 90,30%. Pertumbuhan penerimaan pajak KPP Pratama Lubuk Linggau mengalami pertumbuhan positif tertinggi yakni sebesar 21,91% dari tahun sebelumnya. Sedangkan tiga KPP yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu KPP Pratama Pangkal Pinang (-0,37%), KPP Madya Palembang (-11,97%) dan KPP Pratama Kayu Agung (-12,81%) (www.rakyatpos.com).

Tabel 1.4. Daftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang Mengalami Pertumbuhan Pajak Positif Tahun 2016

Nama KPP	Persentase Pertumbuhan
KPP Pratama Prabumulih	90,30%
KPP Pratama Lubuk Linggau	21,91 %

Sumber : www.rakyatpos.com

Tabel 1.5. Daftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang Mengalami Pertumbuhan Pajak Negatif Tahun 2016

Nama KPP	Persentase Pertumbuhan
KPP Pratama Pangkal Pinang	-0,37%
KPP Madya Palembang	-11,97%
KPP Pratama Kayu Agung	-12,81%

Sumber : www.rakyatpos.com

Adanya peraturan kewajiban pendaftaran wajib pajak baru di KPP Pratama, yaitu PER DIRJEN Nomor 9/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-15/PJ./2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau empat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, yang pada dasarnya melarang KPP Madya Palembang menjadi *Entry Point* bagi wajib pajak baru, mengakibatkan KPP Madya Palembang tidak dapat lagi melakukan kegiatan ekstensifikasi atau menerima pendaftaran wajib pajak baru. Berlakunya kebijakan

tersebut sangat mempengaruhi eksistensi dari wajib pajak KPP Madya Palembang, karena dengan karakteristik wajib pajak yang bekerja berdasarkan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, yang biasanya tidak dalam jangka waktu yang lama, mengakibatkan setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin lama semakin berkurang, hal ini mengakibatkan setiap tahunnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan potensi penerimaan pajak (Yogias, 2017).

Krisbianto (2007), dalam penelitiannya efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan faktor-faktor yang mendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada realisasi surat perintah pemeriksaan pajak yang selesai dan juga berdasarkan realisasi jumlah surat ketetapan pajak dimana pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wulandari dan Sabijono (2014), dalam penelitiannya efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Manado. Hasil perhitungan efektivitas yang dilakukan berdasarkan realisasi surat perintah pemeriksaan dan realisasi surat ketetapan pajak pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 termasuk dalam kriteria tidak efektif. Berdasarkan hasil uraian dan penelitian terdahulu yang masih terdapat *research gap* maka membuat peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Efektivitas atas Ketetapan Hasil Pemeriksaan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas atas ketetapan hasil pemeriksaan pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang?.
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas pemeriksaan pajak serta bagaimana upaya Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Efektivitas atas ketetapan hasil pemeriksaan pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.
2. Faktor pendukung efektivitas pemeriksaan dan faktor yang menghambat efektivitas pemeriksaan dan upaya Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang mengatasi hambatan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
 - b. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini, serta diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.
 - c. Penulis, sebagai sarana memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai efektivitas atas ketetapan hasil pemeriksaan pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang pada khususnya dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak.
 - b. Wajib pajak, sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kesadaran dan kejujuran serta ketelitian dalam membayar pajak.



DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662 Telp. (0711) 580964,
Fax (0711) 580964 Laman: <http://fe.unsri.ac.id> – email: dekan@fe.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 3988/SK/UN9.1.1/PS/2018

TENTANG

PANITIA PEMBIMBING PERSIAPAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat saudara Novia Indri Pratiwi NIM 01031381720081 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tanggal 3 Desember 2018 hal pembimbing persiapan proposal skripsi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan persiapan proposal skripsi, perlu mengangkat panitia pembimbing persiapan proposal skripsi;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
4. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menristek Dikti RI. No. 12 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0306/UN9/KP/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat panitia pembimbing persiapan proposal skripsi mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Taufiq, S.E., M. Si (Dekan)
Wakil Penanggung Jawab : Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E (Wkl. Dekan Bid. Akademik)
Koordinator : Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak (Kajur Akuntansi)
Pembimbing :
Ketua : Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak
Anggota : Meita Rahmawati, S.E., M. Acc., Ak

Mahasiswa yang akan dibimbing :

Nama : Novia Indri Pratiwi
NIM : 01031381720081
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan
Judul Proposal Skripsi : Analisis Efektivitas Atas Ketetapan Hasil Pemeriksaan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 12 Maret 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 12 Desember 2018

Dekan,

Prof. Dr. Taufiq, S.E., M. Si
NIP 19681224 199303 1 002

Tembusan :

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan. Akuntansi
3. Kasubbag. Pendidikan FE Unsri
4. Kasubbag Kepegawaian/Kuangan FE Unsri
5. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662 Telp. (0711) 580964,
Fax (0711) 580964 Laman: <http://fe.unsri.ac.id> – email: dekan@fe.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 1653/UN9.FE/TU.SK/2019

TENTANG

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat saudara Novia Indri Pratiwi NIM 01031381720081 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tanggal 17 Mei 2019 hal permohonan pembimbing skripsi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa, perlu mengangkat panitia pembimbing skripsi;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
4. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menristek Dikti RI, No. 12 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0306-UN9/KP-2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat panitia pembimbing skripsi mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Taufiq, S.E., M. Si (Dekan)
Wakil Penanggung Jawab : Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M. E (Wkl. Dekan Bid. Akademik)
Koordinator : Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak (Kajur. Akuntansi)

Pembimbing :
Ketua : Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak
Anggota : Meita Rahmawati, S.E., M. Acc., Ak

Mahasiswa yang akan dibimbing :

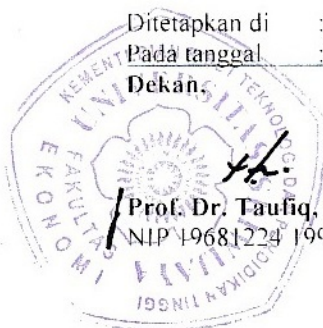
Nama : Novia Indri Pratiwi
NIM : 01031381720081
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan
Judul Proposal Skripsi : Analisis Efektivitas Atas Ketetapan Hasil Pemeriksaan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 23 November 2019, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 23 Mei 2019

Dekan,

Prof. Dr. Taufiq, S.E., M. Si
NIP. 49681224 199303 1 002



Tembusan :

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan. Akuntansi
3. Kasubbag. Pendidikan FE Unsri
4. Kasubbag Kepegawaian/Keuangan FE Unsri
5. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662 Telp. (0711) 580964,
Fax (0711) 580964 Laman: <http://fe.unsri.ac.id> – email: dekan@fe.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 2286/UN9.FE/TU.SK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat saudara Novia Indri Pratiwi NIM 01031381720081 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tanggal 25 Juli 2019 hal permohonan ujian komprehensif.
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya perlu dilaksanakan ujian komprehensif;
b. bahwa untuk kelancaran dalam melaksanakan ujian komprehensif tersebut, perlu mengangkat panitia ujian komprehensif;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
4. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menristek Dikti RI. No. 12 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0306/UN9/KP/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

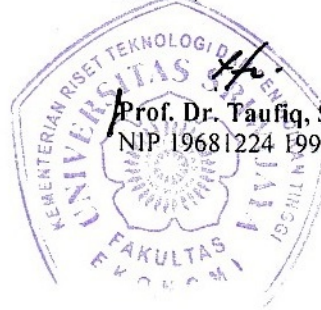
- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat panitia ujian komprehensif mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Taufiq, S.E., M. Si (Dekan)
Wakil Penanggung Jawab : Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E (Wkl. Dekan Bid. Akademik)
Koordinator : Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak (Kajur. Akuntansi)
Pembimbing :
Ketua : Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak
Anggota : Meita Rahmawati, S.E., M. Acc., Ak
Penguji : Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak
Mahasiswa yang akan ujian :
Nama : Novia Indri Pratiwi
NIM : 01031381720081
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan
Judul Proposal Skripsi : Analisis Efektivitas Atas Ketetapan Hasil Pemeriksaan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya ujian komprehensif, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 26 Juli 2019

Dekan,



Prof. Dr. Taufiq, S.E., M. Si
NIP 19681224 199303 1 002

Tembusan :

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan. Akuntansi
3. Kasubbag. Pendidikan FE Unsri
4. Kasubbag Kepegawaian/Keuangan FE Unsri
5. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN
DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

JALAN TASIK KAMBANG IWAK, PALEMBANG 30135, KOTAK POS 1156
TELEPON (0711) 357077; FAKSIMILE (0711) 313119, (0711) 351512; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL : pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 878 /WPJ.03/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Pemberian Izin Riset

6 Mei 2019

Yth. Koordinator Program Studi Akuntansi
Universitas Sriwijaya
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar
Palembang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 210/UN9.1.1.2/PS/2019 tanggal 14 Maret 2019 hal Mohon Izin Penelitian atas :

Nama/NPM : Novia Indri Pratiwi / 01031381720081

dengan ini Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/ penyebaran kuesioner/ wawancara/ pengambilan data statistik untuk penelitian dan atau riset pada **KPP Madya Palembang**, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id dan djpsumselbabel@gmail.com

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor

Imam Arifin



Tembusan:
Saudara/i Novia Indri Pratiwi, selaku mahasiswa/i yang melaksanakan Riset.

Kp.: BD.05/BD.0501



Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset)

Nama Unit: Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Vadri Usman**

NIP : **196707031993111001**

Jabatan : **Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang**

dengan ini menyatakan bahwa:

1. pada dasarnya Kami **menerima/menolak*** permohonan mahasiswa/peneliti dengan identitas seperti tersebut pada surat permohonan izin penelitian (riset) untuk melakukan penelitiannya pada unit Kami.
2. Kami bersedia membantu menjawab/memberikan **sebagian/seluruh*** data/keterangan/informasi yang diajukan oleh mahasiswa/peneliti, sepanjang data/keterangan/informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Bentuk Permohonan Data/Keterangan/Informasi ¹		Keputusan ²		Pemberian Data Dalam Bentuk: ³	
		Ya	Tidak		
<input checked="" type="checkbox"/>	Wawancara (<i>Daftar/Pedoman Wawancara Ada/Tidak Ada*</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Kuesioner (<i>Contoh Kuesioner Ada/Tidak Ada*</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Data Statistik:				
No.	Jenis Data ⁴				
1	Profil KPP Madya Palembang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Jumlah Target dan Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tahun 2015-2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Jumlah Target dan Realisasi Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun 2015-2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Efektivitas Pemeriksaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Catatan:⁵

Petunjuk Pengisian:

- (*) : coret yang tidak diperlukan.
- (1) & (4) : diisi oleh pemohon izin penelitian (riset).
- (2) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan (ya) atau penolakan (tidak).
- (3) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan pemberian data dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*.
- (5) : diisi oleh pejabat berwenang apabila ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian, misalnya penjelasan terkait dengan penolakan pemberian izin penelitian (riset)

Palembang, 22 April 2019
 Kepala Kantor

Vadri Usman

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Novia Indri Pratiwi
Nomor Pokok Mahasiswa : 01031301720081
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Alamat Domisili : Jl. Akmal No. 787 Rt. 015 Rw 004, Krt. Pasar Baru, Kec. Baturaja Timur
Telfon/ HP : 0822 8999 6668

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah selesai melaksanakan riset dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak bersedia menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil riset untuk keperluan dokumentasi di Perpustakaan DJP. Hasil Riset akan dikirimkan ke alamat sebagai berikut :

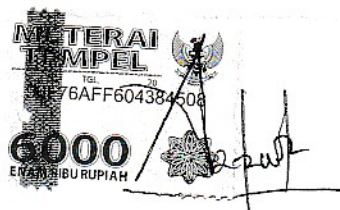
1. Hard Copy
Perpustakaan Kantor Pusat DJP
Gedung Utama, Lantai 3
Jl. Jend Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan 12190
atau

2. Sofft Copy

Email : perpustakaan@pajak.go.id

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 18 April 2019





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
KAMPUS PALEMBANG

Jln. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139, Telp. (0711) 365390,351831,320233, Fax. (0711) 315557

Nomor : 210/UN9.1.1.2/PS/2019
Hal : *Mohon Izin Penelitian*

14 Maret 2019

Yth **Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang**
Jalan Tasik Kambang Iwak
Palembang 30135

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, maka Mahasiswa/i tersebut di bawah ini :

Nama : Novia Indri Pratiwi
NIM : 01031381720081
Jurusan : Akuntansi

Diwajibkan menyusun skripsi dalam Mata Kuliah : Perpajakan

Dengan Judul Proposal Skripsi :

"Analisis Efektivitas Atas Ketetapan Hasil Pemeriksaan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang "

Untuk menyusun skripsi tersebut, dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Izin Penelitian berikut data dari Instansi/Dinas/Perusahaan/Usaha yang ada dibawah pimpinan Bapak/Ibu kepada yang bersangkutan.

Perlu kami jelaskan bahwa data/keterangan tersebut di atas *tidak akan dipublikasikan (hanya dipergunakan untuk bahan pengkajian ilmiah).*

Demikian atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Koordinator Program Studi Akuntansi,

Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak
NIP. 19650311 199203 2 002





DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KPP MADYA PALEMBANG

308

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penyelesaian SP2 KPP Madya Palembang tahun 2015-2018 (dalam bentuk jumlah surat)

Tahun	Target	Realisasi
2015	356	366
2016	430	515
2017	395	379
2018	441	410

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) KPP Madya Palembang Tahun 2015-2018 (dalam bentuk rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2015	432.000.000.000	199.399.881.963
2016	442.773.000.000	64.211.026.391
2017	157.801.342.675	90.222.086.067
2018	288.099.306.000	159.726.441.340

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang Tahun 2015-2018 (dalam bentuk rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2015	4.494.495.244.104	3.317.529.531.811
2016	4.500.062.873.843	2.910.038.494.322
2017	4.050.031.795.000	2.912.112.533.406
2018	3.890.719.128.000	3.124.752.884.988

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

**REALISASI APBN
TAHUN ANGGARAN 2015**
Tanggal : 1 Januari s.d. 31 Desember 2015

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBNP*	REALISASI	
		JUMLAH	%
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.761,6	1.504,5	85,4
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.758,3	1.494,1	85,0
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.489,3	1.240,4	83,3
a. Pajak Dalam Negeri	1.440,0	1.205,5	83,7
i. Pajak Penghasilan	679,4	602,3	88,7
- Migas	49,5	49,7	100,3
- Non - Migas	629,8	552,6	87,7
ii. Pajak Pertambahan Nilai	576,5	423,7	73,5
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	26,7	29,3	109,6
iv. BPHTB	0,0	0,0	0,0
v. Cukai	145,7	144,6	99,2
vi. Pajak lainnya	11,7	5,6	47,5
b. Pajak Perdagangan Internasional	49,3	34,9	70,9
i. Bea Masuk	37,2	31,2	83,9
ii. Bea Keluar	12,1	3,7	30,9
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	269,1	253,7	94,3
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	118,9	102,3	86,0
i. Migas	81,4	78,4	96,3
ii. Non Migas	37,6	24,0	63,8
b. Bagian Laba BUMN	37,0	37,6	101,9
c. PNBPN Lainnya	90,1	78,5	87,2
d. Pendapatan BLU	23,1	35,2	152,4
II. HIBAH	3,3	10,4	314,9
B. BELANJA NEGARA	1.984,1	1.796,6	90,5
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.319,5	1.173,6	88,9
1. Belanja Pegawai	299,3	281,1	93,9
2. Belanja Barang	259,7	232,4	89,5
3. Belanja Modal	252,8	209,0	82,7
4. Pembayaran Kewajiban Utang	155,7	156,0	100,2
a. Utang Dalam Negeri	141,2	141,9	100,5
b. Utang Luar Negeri	14,5	14,1	97,1
5. Subsidi	212,1	186,0	87,7
a. Subsidi Energi	137,8	119,1	86,4
i. BBM (Pertamina)	64,7	60,8	93,9
ii. Listrik (PLN)	73,1	58,3	79,7
b. Subsidi Non Energi	74,3	66,9	90,0
6. Belanja Hibah	4,6	3,1	66,6
7. Bantuan Sosial	103,6	97,0	93,7
8. Belanja Lainnya	31,7	8,9	28,2
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	664,6	623,0	93,7
1. Transfer ke Daerah	643,8	602,2	93,5
a. Dana Perimbangan	521,8	485,8	93,1
i. Dana Bagi Hasil	110,1	78,1	70,9
ii. Dana Alokasi Umum	352,9	352,9	100,0
iii. Dana Alokasi Khusus	58,8	54,9	93,3
b. Dana Otonomi Khusus	17,1	17,1	100,0
c. Dana Keistimewaan DIY	0,5	0,5	100,0
d. Dana Transfer Lainnya	104,4	98,8	94,6
2. Dana Desa	20,8	20,8	100,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(66,8)	(136,1)	203,8
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(222,5)	(292,1)	131,3
E. PEMBIAYAAN	222,5	318,1	143,0
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	242,5	307,8	126,9
1. Perbankan dalam negeri	4,8	3,8	80,1
2. Non-perbankan dalam negeri	237,7	303,9	127,8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(20,0)	10,4	(51,9)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	48,6	77,5	159,3
a. Pinjaman Program	7,5	55,1	734,5
b. Pinjaman Proyek	41,1	22,4	54,5
2. Penerusan SLA	(4,5)	(1,1)	25,0
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(64,2)	(66,0)	102,8

Catatan :

* Pagu berdasarkan pagu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 yang disajikan berdasarkan klasifikasi akuntansi

(1) Laporan disusun berdasarkan data realisasi sementara s.d. 31 Desember 2015

(2) Laporan bersifat sangat sementara



REALISASI APBN
TAHUN ANGGARAN 2016
Tanggal : 1 Januari s.d. 31 Desember 2016

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBNP*	REALISASI	
		JUMLAH	%
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.786,2	1.555,1	87,1
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.784,2	1.546,9	86,7
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.539,2	1.285,0	83,5
a. Pajak Dalam Negeri	1.503,3	1.249,5	83,1
i. Pajak Penghasilan	855,8	666,2	77,8
- Migas	36,3	36,1	99,3
- Non - Migas	819,5	630,1	76,9
ii. Pajak Pertambahan Nilai	474,2	412,2	86,9
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	17,7	19,4	109,8
iv. BPHTB	0,0	0,0	0,0
v. Cukai	148,1	143,5	96,9
vi. Pajak lainnya	7,4	8,1	109,3
b. Pajak Perdagangan Internasional	35,9	35,5	98,9
i. Bea Masuk	33,4	32,5	97,3
ii. Bea Keluar	2,5	3,0	119,9
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	245,1	261,9	106,9
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	90,5	65,7	72,6
i. Migas	68,7	44,9	65,3
ii. Non Migas	21,8	20,8	95,3
b. Bagian Laba BUMN	34,2	37,1	108,7
c. PNPB Lainnya	84,1	117,2	139,3
d. Pendapatan BLU	36,3	41,9	115,6
II. HIBAH	2,0	8,2	417,0
B. BELANJA NEGARA	2.082,9	1.860,3	89,3
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.306,7	1.150,1	88,0
1. Belanja Pegawai	342,4	305,1	89,1
2. Belanja Barang	304,2	259,4	85,3
3. Belanja Modal	206,6	166,4	80,6
4. Pembayaran Kewajiban Utang	191,2	182,8	95,6
a. Utang Dalam Negeri	174,0	167,8	96,4
b. Utang Luar Negeri	17,2	15,0	87,2
5. Subsidi	177,8	174,2	98,0
a. Subsidi Energi	94,4	106,8	113,2
i. BBM (Pertamina)	43,7	43,7	100,0
ii. Listrik (PLN)	50,7	63,1	124,5
b. Subsidi Non Energi	83,4	67,4	80,9
6. Belanja Hibah	8,5	6,5	76,3
7. Bantuan Sosial	53,4	49,6	92,9
8. Belanja Lainnya	22,5	6,0	26,8
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	776,3	710,3	91,5
1. Transfer ke Daerah	729,3	663,6	91,0
a. Dana Perimbangan	705,5	639,8	90,7
i. Dana Transfer Umum	494,4	475,9	96,3
- Dana Bagi Hasil	109,1	90,5	83,0
- Dana Alokasi Umum	385,4	385,4	100,0
ii. Dana Transfer Khusus	211,0	163,9	77,7
- Dana Alokasi Khusus Fisik	89,8	75,2	83,7
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik	121,2	88,7	73,1
b. Dana Insentif Daerah	5,0	5,0	100,0
c. Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY	18,8	18,8	100,0
i. Dana Otonomi Khusus	15,4	15,4	100,0
ii. Dana Tambahan Otonomi Khusus	2,9	2,9	100,0
iii. Dana Keistimewaan DIY	0,5	0,5	100,0
2. Dana Desa	47,0	46,7	99,4
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(105,5)	(122,5)	116,1
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(296,7)	(305,2)	102,9
% Defisit terhadap PDB	(2,37)	(2,46)	
E. PEMBIAYAAN	296,7	331,0	111,6
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	299,3	344,9	115,3
1. Perbankan dalam negeri	25,4	25,8	101,8
2. Non-perbankan dalam negeri	273,9	319,1	116,5
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(2,5)	(13,9)	550,8
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	73,0	58,3	79,8
a. Pinjaman Program	35,8	35,3	98,7
b. Pinjaman Proyek	37,2	22,9	61,7
2. Penerusan SLA	(5,8)	(3,4)	59,1
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(69,7)	(68,7)	98,7

Catatan :

* Pagu berdasarkan pagu pada UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 14 tahun 2015 tentang APBN TA 2016 yang disajikan berdasarkan klasifikasi akuntansi. Rincian Belanja Pemerintah Pusat mengacu pada Perpres nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2016

(1) Laporan disusun berdasarkan data realisasi sementara s.d. 31 Desember 2016
PDB : Rp11.541 triliun (tahun 2015), Rp12.407 triliun (tahun 2016)

(2) Laporan bersifat sangat sementara



(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBNP*	REALISASI	
		JUMLAH	%
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1,736.1	1,666.4	96.0
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1,733.0	1,654.7	95.5
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1,472.7	1,343.5	91.2
a. Pajak Dalam Negeri	1,436.7	1,304.3	90.8
i. Pajak Penghasilan	784.0	646.8	82.5
- Migas	41.8	50.3	120.5
- Non - Migas	742.2	596.5	80.4
ii. Pajak Pertambahan Nilai	475.5	480.7	101.1
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	15.4	16.8	108.8
iv. Cukai	153.2	153.3	100.1
v. Pajak lainnya	8.7	6.7	77.5
b. Pajak Perdagangan Internasional	36.0	39.2	109.0
i. Bea Masuk	33.3	35.1	105.4
ii. Bea Keluar	2.7	4.1	153.6
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260.2	311.2	119.6
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	95.6	111.1	116.2
i. Migas	72.2	81.8	113.3
ii. Non Migas	23.4	29.3	125.0
b. Bagian Laba BUMN	41.0	43.9	107.1
c. PNBPN Lainnya	85.1	108.8	128.0
d. Pendapatan BLU	38.5	47.3	122.8
II. HIBAH	3.1	11.6	374.2
B. BELANJA NEGARA	2,133.3	2,007.4	94.1
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1,367.0	1,265.4	92.6
1. Belanja Pegawai	343.7	312.7	91.0
2. Belanja Barang	294.7	291.5	98.9
3. Belanja Modal	226.1	208.7	92.3
4. Pembayaran Kewajiban Utang	219.2	216.6	98.8
a. Utang Dalam Negeri	202.9	200.0	98.6
b. Utang Luar Negeri	16.3	16.6	101.7
5. Subsidi	168.9	166.4	98.5
a. Subsidi Energi	89.9	97.6	108.7
i. BBM (Pertamina)	44.5	47.0	105.7
ii. Listrik (PLN)	45.4	50.6	111.5
b. Subsidi Non Energi	79.0	68.8	87.0
6. Belanja Hibah	5.5	5.4	98.4
7. Bantuan Sosial	59.0	55.3	93.8
8. Belanja Lainnya	49.9	8.8	17.7
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766.3	742.0	96.8
1. Transfer ke Daerah	706.3	682.2	96.6
a. Dana Perimbangan	678.6	654.5	96.4
i. Dana Transfer Umum	494.0	486.8	98.6
- Dana Bagi Hasil	95.4	88.2	92.5
- Dana Alokasi Umum	398.6	398.6	100.0
ii. Dana Transfer Khusus	184.6	167.7	90.8
- Dana Alokasi Khusus Fisik	69.5	62.1	89.3
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik	115.1	105.6	91.7
b. Dana Insentif Daerah	7.5	7.5	100.0
c. Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY	20.2	20.2	100.0
i. Dana Otonomi Khusus	15.9	15.9	100.0
ii. Dana Tambahan Otonomi Khusus	3.5	3.5	100.0
iii. Dana Keistimewaan DIY	0.8	0.8	100.0
2. Dana Desa	60.0	59.8	99.6
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(178.0)	(124.4)	69.9
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(397.2)	(341.0)	85.8
% Defisit terhadap PDB	(2.92)	(2.51)	
E. PEMBIAYAAN	397.2	366.6	92.3
I. PEMBIAYAAN UTANG	461.3	429.1	93.0
1. Surat Berharga Negara (Neto)	467.3	441.8	94.5
2. Pinjaman (Neto)	(6.0)	(12.7)	213.5
a. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	1.7	0.6	37.4
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	2.5	1.3	52.2
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(0.8)	(0.7)	85.6
b. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(7.7)	(13.4)	173.9
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	57.5	51.7	90.0
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(65.2)	(65.1)	99.9
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59.7)	(59.8)	100.0
1. Investasi Kepada BUMN	(6.4)	(6.4)	100.0
2. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(3.2)	(3.2)	100.0
3. Investasi Kepada BLU	(48.2)	(48.2)	100.0
4. Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	(2.0)	(2.0)	101.0
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3.7)	(2.1)	55.9
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1.0)	(1.0)	100.0
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0.3	0.4	119.7

Catatan :

* Pagu berdasarkan pagu pada UU Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017 yang disajikan berdasarkan klasifikasi akuntansi.

(1) Laporan disusun berdasarkan data realisasi sementara s.d. 31 Desember 2017

PDB : Rp12.521 triliun (tahun 2016), Rp13.589 triliun (tahun 2017-APBNP)

(2) Laporan bersifat sangat sementara

Realisasi APBN sampai dengan akhir November 2018

Capaian positif tercermin dalam realisasi APBN hingga periode 30 November 2018, baik dari sisi pendapatan negara maupun belanja negara. Kondisi tersebut juga didukung oleh strategi pengendalian defisit anggaran yang hingga saat ini masih dapat dijaga di bawah target APBN. Rasio defisit anggaran 1,89 persen terhadap PDB, dan defisit keseimbangan primer Rp28,88 triliun, merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir pada periode yang sama.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.662,94 triliun, tumbuh sebesar 18,80 persen (yoy) atau 87,77 persen dari target dalam APBN tahun 2018, lebih baik dibandingkan realisasi pendapatan negara tahun 2017 yang mencapai Rp1.399,81 triliun atau 80,63 persen dari targetnya. Penjelasan rincian realisasi pendapatan negara sebagai berikut:

- a. Laju realisasi penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 15,27 persen (yoy) atau mencapai Rp1.301,47 triliun (80,43 persen dari target APBN tahun 2018), terutama bersumber dari:

- Penerimaan Pajak tumbuh sebesar 15,35 persen (yoy) dengan capaian sebesar Rp1.136,66 triliun atau 79,82 persen dari target APBN tahun 2018.
 - Penerimaan bea dan cukai tumbuh sebesar 14,70 persen (yoy) dengan capaian sebesar Rp164,82 triliun atau 84,91 persen dari target APBN tahun 2018.
- b. Realisasi PNBPN juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dan sangat positif yaitu sebesar 31,54 persen (yoy) yang mampu membukukan nilai realisasi sebesar Rp350,86 triliun atau 127,39 persen dari target APBN tahun 2018.
 - c. Sementara itu, penerimaan hibah juga mengalami peningkatan sebesar 166,87 persen (yoy) dengan nilai nominal Rp10,60 triliun atau 885,75 persen dari target APBN tahun 2018, meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp3,97 triliun atau 127,81 persen dari target APBN/P tahun 2017.

Selanjutnya, untuk kinerja penyerapan belanja negara meningkat 11,06 persen (yoy) yang mencapai Rp1.942,93 triliun atau 87,49 persen dari pagu APBN tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja pemerintah pusat tumbuh 16,78 persen (yoy), dengan capaian Rp1.225,86 triliun atau 84,28 persen dari pagu. Kontribusi belanja negara ini didukung oleh:
 - belanja K/L yang meningkat sebesar 11,96 persen (yoy) dengan nominal Rp666,43 triliun atau 78,64 persen dari pagu ;
 - belanja Non K/L naik 23,10 persen (yoy) yang mencapai Rp559,42 triliun atau 92,15 persen dari pagu.
- b. Sedangkan TKDD tumbuh sebesar 2,48 persen (yoy) dengan capaian Rp717,07 triliun atau 93,59 persen dari pagu APBN tahun 2018, diantaranya adalah :
 - Transfer ke Daerah meningkat sebesar 2,77 persen (yoy) dengan nominal

Rp662,64 triliun atau 93,84 persen dari pagu.

- Dana Desa sedikit mengalami penurunan sebesar 0,99 persen (yoy) dengan capaian Rp54,43 triliun atau 90,71 persen dari pagu.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara di atas, maka realisasi defisit anggaran sebesar Rp279,99 triliun dengan defisit keseimbangan primer sebesar Rp28,88 triliun, menurun dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2017 yakni Rp349,64 triliun dengan defisit keseimbangan primer sebesar Rp139,10 triliun. Dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp346,16 triliun termasuk untuk pembiayaan investasi sebesar Rp15,61 triliun, terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp66,17 triliun. Melihat gambaran capaian fiskal periode sampai dengan 30 November 2018 tersebut, maka komitmen Pemerintah dalam rangka mewujudkan APBN yang lebih sehat, realistis, dan kredibel semakin nyata.

WAWANCARA

Ditujukan kepada : Pegawai Fungsional Pemeriksaan Pajak KPP Madya Palembang

Bersama : 1. Bapak. Taufan Kurniawan

2. Bapak. Afli Yuma Delon

Tanggal, Waktu : 15 April 2019, Pukul 11.03 s/d selesai

Pertanyaan:

1. Menurut bapak, apakah sebab Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan?

Jawab :

Penyebab pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak biasanya karena beberapa hal seperti terdapat permintaan klarifikasi data oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak, terdapat analisis data oleh Direktorat Jenderal Pajak atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan atau adanya permohonan oleh Wajib Pajak serta Laporan Surat Pembertitahuan Wajib Pajak lebih bayar restitusi maupun kompensasi.

2. Berapa lama jangka waktu klarifikasi data oleh Direktorat Jenderal harus ditindaklanjuti?

Jawab:

Untuk lama jangka waktu klarifikasi berdasarkan SE-39/PJ./2015, sebaiknya Wajib Pajak harus menanggapi permintaan klarifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan tersebut dikirim.

Apabila Wajib Pajak selama jangka waktu tersebut tidak melakukan tanggapan, maka Wajib Pajak akan diajukan pemeriksaan.

3. Lalu bagaimanakah jika Wajib Pajak telah menanggapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi penjelesan Wajib Pajak tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak?

Jawab:

Jika Wajib Pajak yang telah menanggapi surat permintaan klarifikasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi tanggapan dari Wajib Pajak tidak sesuai dengan data yang ada, maka ada dua kemungkinan yaitu:

1. Jika dalam menanggapi surat permintaan klarifikasi, Wajib Pajak memberikan bukti-bukti, catatan, dan/ atau dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka proses permintaan klarifikasi dihentikan dan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
 2. Sebaliknya, jika dalam menanggapi surat permintaan klarifikasi, Wajib Pajak tidak dapat memberikan bukti-bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka proses permintaan klarifikasi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
4. Menurut bapak, benarkah jika tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dapat diperoleh dengan cara membandingkan data jumlah target dan realisasi Surat

Perintah Pemeriksaan (SP2) dan data jumlah target dan realisasi Surat Ketetapan Pajak (SKP)?

Jawab:

Ya benar, karena sebenarnya jika berbicara tentang efektivitas maka perlu tahu berapa besar hasil perbandingan antara realisasi dengan jumlah yang diharapkan (target). Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan pajak, Pemeriksa Pajak harus memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan juga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Efektivitas pajak juga dapat dilihat dari data jumlah penerimaan hasil pemeriksaan pajak dari hasil pemeriksaan dan realisasi jumlah SKP yang dibayar.

5. Apakah jumlah SP2 dan SKP yang telah berhasil diselesaikan oleh KPP Madya Palembang sebanding dengan jumlah SP2 yang diterbitkan?

Jawab:

Jika SP2 yang terbit dan realisasi SP2 yang telah diselesaikan tidak terlalu banyak selisihnya maka itu bisa dikerjakan sehingga bisa mencapai tingkat efektivitas. Akan tetapi jika ditinjau dari target jumlah penerimaan dari pemeriksaan pajak dan realisasi nya maka itu sulit karena jumlah nominal target jumlah penerimaan dari pemeriksaan pajak terlalu besar dibandingkan realisasi yang dicapai oleh KPP Madya Palembang. Namun, tidak mustahil, yang jelas kami sebagai pegawai fungsional pemeriksaan pajak tiap periode nya selalu berusaha agar penerimaan hasil pemeriksaan berdasarkan SKP bisa terus meningkat seperti yang diharapkan.

6. Apakah pemeriksaan pajak di KPP Madya Palembang mengalami kendala?
Apakah kendala yang dialami KPP Madya Palembang dalam melakukan pemeriksaan pajak?

Jawab:

Ya terkadang mengalami kendala. Kendala yang bisa terjadi ketika melakukan pemeriksaan pajak seperti Wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan tidak meminjamkan atau meminjamkan sebagian dokumen atau data yang diminta, adanya pembatasan akses data pemeriksaan, misalnya data kantor cabang (atas wajib pajak yang sedang diperiksa) yang terdaftar di kantor lain. Bukan hanya itu saja terkadang faktor penghambat juga bisa terjadi karena psikologi Wajib Pajak yang berbeda-beda dan masih kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap pentingnya pajak. Akan tetapi selain ada faktor penghambat ada juga faktor pendukung seperti Wajib Pajak yang kooperatif, adanya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas, terjalin komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak, telah tersedianya fasilitas kantor yang memadai agar pemeriksaan dilaksanakan dengan lancar, pemanfaatan teknologi atau aplikasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu SIDJP dan juga *e-Audit* dan juga dilakukan peningkatan kemampuan pemeriksa pajak baik kegiatan formal dan non formal seperti *In House Training* (IHT), workshop, diklat maupun *e-learning*.

7. Mengapa target penerimaan pajak berdasarkan jumlah SKP pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2015 dan 2016?

Jawab:

Jika berbicara target penerimaan pajak, target penerimaan pajak merupakan target yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Direktorat Jenderal Pajak dan kemudian sebagai otoritas perpajakan yang mengemban amanat Undang-Undang untuk mengadministrasikan penerimaan pajak Pemerintah Pusat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan akses kepada Wajib Pajak. Sehingga target yang telah direncanakan tersebut *dibreakdown* kepada unit-unit yang sudah terbentuk seperti KPP, KP2KP. Pemeriksaan itu kan sampai kita terbitkan penetapan, nanti hasilnya ada 2 (dua) nanti dia setuju atau dia keberatan. Jika dia setuju berarti dia bayar, nah nanti ada dua lagi yaitu jika dia bayar dibawah 30 (tiga puluh) hari setelah SKP nya terbit maka itu termasuk prestasi pemeriksaan pajak, sebaliknya jika dia setuju tapi belum bayar maka itu nanti ditagih oleh seksi penagihan. Akan tetapi, jika dia keberatan maka SKP tersebut belum bisa dibayar karena diaturan terbaru SKP itu dibayar wajib pajak sejauh yang mana di setujui, nah pola nya jika ditarik kan dengan penerimaan pajaknya yaitu berapa SKP terbit dan berapa cairnya.

8. Menurut bapak, bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan agar realisasi penerimaan pajak dapat dapat terus meningkat setiap tahunnya?

Jawab :

Upaya yang bisa dilakukan ya seperti memberikan kenyamanan dan kemudahan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang terhadap Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak, seperti *e-spt*, *e-filing*, dan *e-billing*.

Ada juga tempat pelayanan terpadu yang sudah didesain agar Wajib Pajak nyaman, selain itu untuk meningkatkan keterampilan, kinerja, dan pengawasan terhadap pegawai juga sangat penting pada lingkungan kerja KPP Madya Palembang seperti melaksanakan pengawasan internal terhadap pegawai dan melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai yang dilakukan oleh tim internal khusus yang ditentukan KPP Madya Palembang. Memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan terhadap tingkat kedisiplinan juga dilakukan oleh pegawai dalam lingkungan KPP Madya Palembang sehingga dapat meningkatkan kinerja dan motivasi dikalangan pegawai di dalam KPP Madya Palembang, dan tidak hanya itu saja upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak juga dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi terhadap peraturan baru perpajakan secara rutin kepada Wajib Pajak agar paham akan pentingnya untuk membayar pajaknya, dan diperlukan akses informasi atas aset Wajib Pajak yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah lainnya, contohnya Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Kepemilikan Aset Tanah, dan keterbukaan informasi keuangan perbankan yang nanti akan dibandingkan dengan Aset yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak di Surat Pemberitahuan Pajak.

9. Bagaimanakah tanggapan bapak mendengar berita di www.rakyat.pos yang mengatakan jika Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Kakanwil DJP Sumsel Babel), M. Ismiransyah M. Zain menyatakan penerimaan pajak tahun 2016 di Sumsel dan Babel, KPP Madya mengalami pertumbuhan pajak sebesar (-11,97%) ?

Jawab:

Pertumbuhan pajak negatif, oh itu setoran nya. Jadi dikantor pusat ditetapkan target penerimaan pajak nah dalam setahun itu berapa sih yang harus dikumpulkan dari wajib pajak yang terdaftar. Untuk di KPP banyak faktor kenapa tidak tercapainya target tersebut, bisa jadi karena faktor pertumbuhan ekonomi Sumsel tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Misalnya Kementerian Keuangan dengan target pertumbuhan ekonomi 5% ternyata secara realita pertumbuhan ekonomi di Sumsel tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan makanya bisa terjadi *gap* selisih. Selain itu, ada juga perusahaan itu yang sudah mulai tutup usahanya seperti perusahaan-perusahaan karet karena bisa jadi faktor persaingan bisnis, harga tidak cocok di Bursa Efek Dunia, kalau dilihat dari kinerja kantor selama tahun berjalan ini sudah bagus, hanya satu yaitu realisasi dari target penerimaan pajak yang belum tercapai. Terakhir itu tahun 2013-2014, nah setelah tahun itu kami kesulitan.



10. Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya peraturan yang menerangkan bahwa untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya sudah dibatasi oleh Pusat?

Jawab:

Untuk wajib pajak yang terdaftar di Madya sudah *fix*, jadi Wajib Pajak itu ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan DJP, dan dari DJP akan disetiap tahun dilakukan evaluasi kira-kira berapa sih idealnya. Jadi bukan Wajib Pajak baru masuk ke KPP Madya Palembang melalui proses dan di rangkingkan terlebih dahulu wajib tersebut dan dibuat prioritas nanti dimasukkan menjadi Wajib Pajak Madya. Nah sekarang strateginya pada tahun sekarang sudah tergantungnya jumlah Wajib Pajak, jadi wajib pajak yang di Pratama yang omset nya bagus dinaikkan

menjadi wajib pajak Madya, dan karena itu adanya terjadi perubahan Wajib Pajak dan Wajib Pajak itu termasuk Wajib Pajak baru. Terkaitnya dengan penerimaan pajak, terkadang Perusahaan mengalami pertumbuhan ekonomi ada yang lagi tumbuh, sudah mengalami titik jenuh dan deadline. Nah di KPP Madya Palembang ini macam-macam perusahaan nya ada yang sudah mencapai *mature*, sudah matang, saat nya dia kan turun atau di akan bertahan. Nanti ada ada revaluasi seperti pemisahaan perusahaan yang mana saja lolos berhasil, nanti jika kalau tidak lulus maka dia akan tutup dan akan penghapusan NPWP karena target akan sulit tercapai. Karena asumsi Wajib Pajak yang besar tapi ternyata kontribusi nya tidak sebesar apa yang diharapkan

Mengetahui :

Narasumber 1	Narasumber 2
 Bapak. Taufan Kurniawan	 Bapak. Afli Yuma Delon



**FOTO BERSAMA
PEMBIMBING DAN PENGUJI
PADA SAAT UJIAN KOMPREHENSIF**



Foto Bersama Pembimbing 1 : Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E.,M.B.A.,Ak

(dar sebelah kiri foto : M. Agus Kurniawan, Inna Nuuru Risady, Ibu Luk Luk Fuadah, Ibu Rika Henda Safitri, Novia Indri Pratiwi, dan Rahmatullah)

**FOTO BERSAMA
PEMBIMBING DAN PENGUJI
PADA SAAT UJIAN KOMPREHENSIF**



Foto Bersama Pembimbing 2 : Ibu Meita Rahmawati, S.E.,M.Acc.,Ak

(yang berpose duduk dari sebe : Metha Melinda, Intan Wulandina S)

(yang berdiri dari sebelah kiri :

Vinny Melinda, Hanni Rachmilia, Ibu Meita Rahmawati, Mardalenah, Inna Nuuru Risady, dan Novia Indri Pratiwi)

**FOTO BERSAMA PENGUJI
PADA SAAT UJIAN KOMPREHENSIF**



Foto Bersama Penguji Komprehensif: Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

(dari sebelah kiri foto : Suci Ashabal Jannah, M. Agus Kurniawan, Bapak Arista Hakiki, dan Novia Indri Pratiwi)

FOTO BERSAMA NARASUMBER



**Foto Bersama Narasumber Pada Saat Wawancara :
Bapak Afli Yuma Delon dan Bapak Taufan Kurniawan**

(dari sebelah kiri foto : Bapak Afli Yuma Delon, Inna Nuuru Risady, Novia Indri Pratiwi dan Bapak Taufan Kurniawan)



UN9

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139, Telp (0711) 365390 Fax (0711) 315557

Laman : <http://fe.unsri.ac.id> Email: dekan@fe.unsri.ac.id

AGENDA KONSULTASI

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novia Endri Pratiwi

NIM : 01031381720081

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Dosen Pembimbing : ① Dr. Lut Lut Fuadiah, S.E., M. B.A., Ak
 ② Meita Rahmawati, S.E., M. Acc., Ak

BAB	Diajukan Oleh Mahasiswa		Selesai Diperiksa		Diserahkan Kepada Mahasiswa		Keterangan/Catatan Dosen
	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	
	18/Januari/19	fl	18/Januari/19	fl	18/Januari/19	fl	Detail
	15/Februari/19	fl	15/Februari/19	fl	15/Februari/19	fl	Perbaikan penelitian proposal
	09/Maret/19	fl	09/Maret/19	fl	09/Maret/19	fl	Perbaikan penelitian proposal
	09/April/19	fl	09/April/19	fl	09/April/19	fl	ACC

Catatan :

1. Konsultasi : Diisi tanggal mahasiswa setiap konsultasi kemudian diparaf, kalau belum selesai, tentukan tanggal mahasiswa yang bersangkutan harus datang konsultasi, kemudian di paraf.
2. Setelah selesai konsultasi, mahasiswa harus datang konsultasi, kemudian di paraf.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

UN9

Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139, Telp (0711) 365390 Fax (0711) 315557
Laman : <http://fe.unsri.ac.id> Email: dekan@fe.unsri.ac.id

AGENDA KONSULTASI
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alovia Endri Pratiwi
NIM : 01031381720081
Jurusan : Akuntansi (S1 Acc D3)
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Lukluk Fuadiah, S.E., M.B.A., Ak
2. Mesta Rahmawati, S.E., M. Acc., Ak

BAB	Diajukan Oleh Mahasiswa		Selesai Diperiksa		Diserahkan Kepada Mahasiswa		Keterangan/Catatan Dosen
	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	
	28 Januari 2019	[Paraf]	28 Januari 2019	[Paraf]	28 Januari 2019	[Paraf]	Judul
	04 Maret 2019	[Paraf]	04 Maret 2019	[Paraf]	04 Maret 2019	[Paraf]	Perbaikan penulisan proposal
	08 Maret 2019	[Paraf]	08 Maret 2019	[Paraf]	08 Maret 2019	[Paraf]	Perbaikan data belakang
	15 Maret 2019	[Paraf]	20 Maret 2019	[Paraf]	20 Maret 2019	[Paraf]	Perbaikan penulisan proposal
	22 Maret 2019	[Paraf]	28 Maret 2019	[Paraf]	22 Maret 2019	[Paraf]	Perbaikan penulisan proposal
	25 Maret 2019	[Paraf]	25 Maret 2019	[Paraf]	25 Maret 2019	[Paraf]	Perbaikan penulisan proposal
	26 Maret 2019	[Paraf]	26 Maret 2019	[Paraf]	26 Maret 2019	[Paraf]	Perbaikan penulisan proposal
	29 Maret 2019	[Paraf]	29 Maret 2019	[Paraf]	29 Maret 2019	[Paraf]	Perbaikan penulisan proposal
	01 April 2019	[Paraf]	01 April 2019	[Paraf]	01 April 2019	[Paraf]	Perbaikan penulisan proposal
	02 April 2019	[Paraf]	02 April 2019	[Paraf]	02 April 2019	[Paraf]	Perbaikan penulisan proposal
	08 April 2019	[Paraf]	08 April 2019	[Paraf]	08 April 2019	[Paraf]	Acc Proposal.

Catatan :

1. Konsultasi : Diisi tanggal mahasiswa setiap konsultasi kemudian diparaf, kalau belum selesai, tentukan tanggal mahasiswa yang bersangkutan harus datang konsultasi, kemudian di paraf.
2. Setelah seluruh BAB skripsi diperiksa dan disetujui oleh pembimbing, foto copy agenda konsultasi ini



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

UN9

Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139, Telp (0711) 365390 Fax (0711) 315557

Laman : <http://fe.unsri.ac.id> Email: dekan@fe.unsri.ac.id

AGENDA KONSULTASI
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama Mahasiswa : *Nuvia Endri Pratiwi*
NIM : *01031381720061*
Jurusan : *Akuntansi*
Mata Kuliah Skripsi : *Perpajakan*
Dosen Pembimbing : *1. Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak*
2. Meifa Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak

BAB	Diajukan Oleh Mahasiswa		Selesai Diperiksa		Diserahkan Kepada Mahasiswa		Keterangan/Catatan Dosen
	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	
	<i>09 Jul 2019</i>	<i>jk</i>	<i>16 Jul 2019</i>	<i>jk</i>	<i>16 Jul 2019</i>	<i>jk</i>	<i>Perbaiki</i>
		<i>jk</i>		<i>jk</i>		<i>jk</i>	<i>Perbaiki</i>
		<i>jk</i>		<i>jk</i>		<i>jk</i>	<i>Perbaiki</i>
		<i>jk</i>		<i>jk</i>		<i>jk</i>	<i>Perbaiki</i>
		<i>jk</i>		<i>jk</i>		<i>jk</i>	<i>ACC</i>

Catatan :

- Konsultasi : Diisi tanggal mahasiswa setiap konsultasi kemudian diparaf, kalau belum selesai, tentukan tanggal mahasiswa yang bersangkutan harus datang konsultasi, kemudian di paraf.
- Setelah seluruh BAB skripsi diperiksa dan disetujui oleh pembimbing, foto copy agenda konsultasi ini dilampirkan pada waktu mengajukan permohonan ujian komprehensif.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

UN9

Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139, Telp (0711) 365390 Fax (0711) 315557

Laman : <http://fe.unsri.ac.id> Email: dekan@fe.unsri.ac.id

AGENDA KONSULTASI
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama Mahasiswa : *Novia Endri Pratiwi*
NIM : *01031381720081*
Jurusan : *Akuntansi*
Mata Kuliah Skripsi : *Perpajakan*
Dosen Pembimbing : 1. *Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak*
2. *Meifa Rahmawati, S.E., M. Acc., Ak*

BAB	Diajukan Oleh Mahasiswa		Selesai Diperiksa		Diserahkan Kepada Mahasiswa		Keterangan/Catatan Dosen
	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	
<i>Bab IV</i>	<i>17 Juni 2019</i>	<i>[Signature]</i>	<i>17 Juni 2019</i>	<i>[Signature]</i>	<i>17 Juni 2019</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Perbaikan</i>
<i>Bab IV</i>	<i>20 Juni 2019</i>	<i>[Signature]</i>	<i>20 Juni 2019</i>	<i>[Signature]</i>	<i>20 Juni 2019</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Perbaikan</i>
<i>Bab IV & V</i>	<i>01 Juli 2019</i>	<i>[Signature]</i>	<i>01 Juli 2019</i>	<i>[Signature]</i>	<i>01 Juli 2019</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Perbaikan</i>
<i>Bab</i>	<i>05 Juli 2019</i>	<i>[Signature]</i>	<i>05 Juli 2019</i>	<i>[Signature]</i>	<i>05 Juli 2019</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Acc ujian kompre.</i>

- Catatan :
- Konsultasi : Diisi tanggal mahasiswa setiap konsultasi kemudian diparaf, kalau belum selesai, tentukan tanggal mahasiswa yang bersangkutan harus datang konsultasi, kemudian di paraf.
 - Setelah seluruh BAB skripsi diperiksa dan disetujui oleh pembimbing, foto copy agenda konsultasi ini dilampirkan pada waktu mengajukan permohonan ujian komprehensif.

